



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

TAHUN 2022

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA BATAM**



**RUDI SAKYAKIRTI, SH.MH**

**NIP.19650606 199303 1 018**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.....	4
1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran.....	5
1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN 2020 .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam .....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam .....	20

2.3.1	Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .....	20
2.3.2	Permasalahan dan Hambatan.....	21
2.3.3	Peluang dan Tantangan.....	22
2.3.4	Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4	Review terhadap awal RKPD.....	27
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	32
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM .....</b>		<b>38</b>
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2	Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022.....	31
3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam .....	48
3.4	Program dan Kegiatan.....	49
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM .....</b>		<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020.....	10
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kota Batam.....	28
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Batam.....	32
Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 .....	39
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	48
Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	52
Tabel 8 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 2020 .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

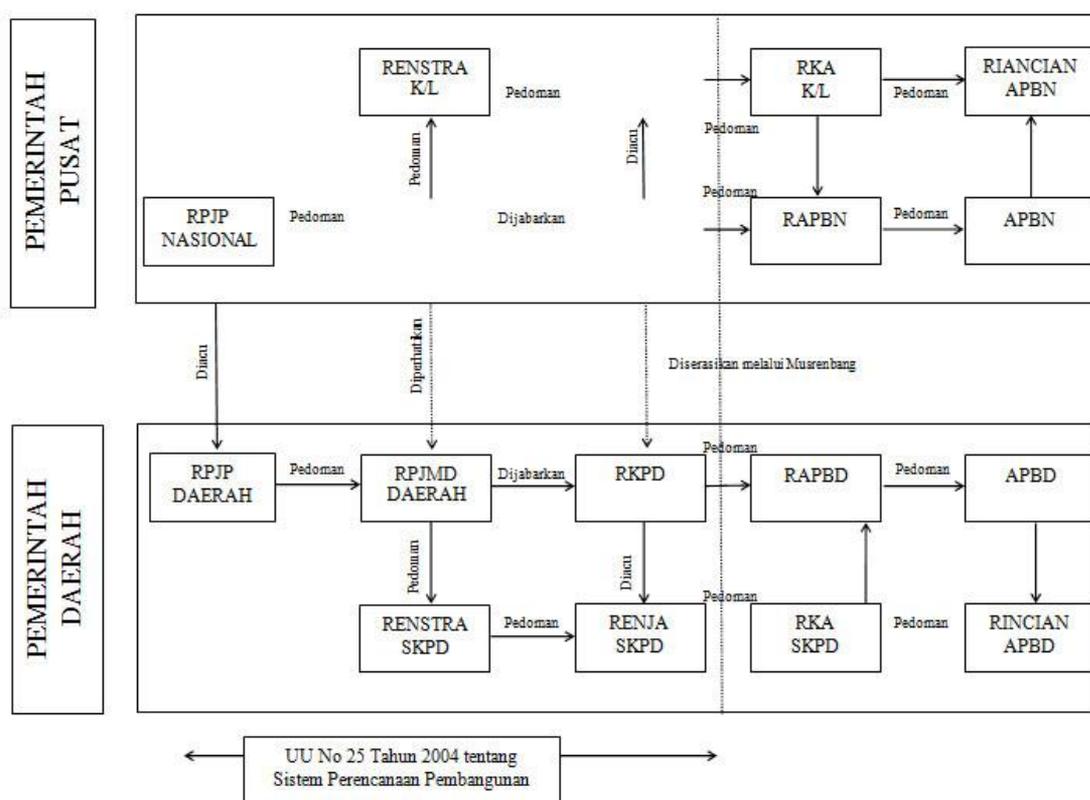
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja, dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2  
Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

### 1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- d. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488);

### **1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran**

Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- l. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;

### **1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja**

Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya;
- 1.2 Landasan hukum;
- 1.3 Maksud dan tujuan dan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN 2020

- 2.1 Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra;
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- 2.4 Review terhadap awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

- 3.1 Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional;
- 3.2 Tema, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022;
- 3.3 Program dan kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

## BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Pada Perubahan Renja tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merencanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
  - 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
  - 1) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
  - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
  - 2) Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja
  - 3) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur
4. Program Peningkatan Hubungan Industrial Yang Harmonis
  - 1) Kegiatan Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit Kota Batam
  - 2) Kegiatan Penyusunan dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan program dan kegiatan yang sama sebagaimana tertuang dalam Renja. Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam :

**TABEL 1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM S.D TAHUN 2021**  
**KOTA BATAM**

**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>									
	Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	1 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	100%
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	100%

	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>	1 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	100%
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	1 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	100%
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1 tahun	1 tahun	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1 tahun	1 tahun	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1 tahun	1 tahun	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1 tahun	1 tahun	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1 tahun	1 tahun	
	<b>Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi</b>	1000 orang	3017 orang	408	408	100%	711	4136	4.1
<b>Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi</b>		1200 orang	4748 orang	488	488	100%	630	2342	4.8	
<b>Jumlah tenaga kerja yang terserap/ditempatkan</b>		20000	13176	22000	20000	100%	28077	61253	3	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Tersedianya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	1000 orang	3017 orang	408 orang	408 orang	100%	711 orang	4136	4.1
	Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja	Tersedianya pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja	1200 orang	4748 orang	488 orang	488 orang	100%	630 orang	2342	4.8
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur	Terlaksananya pengembangan kelembagaan yang berkualitas	30 LPK 30 Instruktur 40 Assesor	110 LPK 150 Instruktur 170 Assesor	35 LPK 20 Instruktur 18 Assesor	35 LPK 20 Instruktur 18 Assesor	100%	28 LPK 18 Instruktur 18 Assesor	173 LPK 188 Instruktur 206 Assesor	6% 6.2% 5.1%
	Kegiatan Sosialisasi Informasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Terlaksananya sosialisasi Informasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)		800 orang	0	0	0	0	800 orang	0,08

	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan tenaga kerja mandiri		175 orang	0	0	0	0	175 orang	0,57
	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping		870 orang	0	0	0	0	870 orang	1,30
	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga kerja Indonesia Luar Negeri dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)		800 orang	0	0	0	0	800 orang	1,00
	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Negeri dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Negeri dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		400 orang	0	0	0	0	400 orang	1,00
	Pembangunan BLK	Pematangan Lahan BLK	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>									
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		1000 orang					711 Orang	4136	4.1
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		1200 orang					28 LPK 18 Instruktur 18 Assesor	2342	4.8

	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30 LPK 30 Instruktur 40 Asesor					630 orang	173 LPK 188 Instruktur 206 Asesor	6% 6.2% 5.1%
	<b>Program Peningkatan Hubungan Industrial Yang Harmonis</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun</b>	90%	95%	92%	76%	82%	94	277	3,01
	Kegiatan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan		600 orang	0	0	0	0	600 orang	0,00
	Kegiatan Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit Kota Batam	Terlaksananya Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit Kota Batam		600 Orang 5 kali	5 kali	5 kali	100	10	600 orang & 20 x	0,10
	Kegiatan Penyusunan dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam	Terlaksananya rapat Penyusunan dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam dan kunjungan kerja Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit		24 kali	5 kali	5 kali	100 %	10 kali	39 kali	2,08
	Kegiatan Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja	Terlaksananya Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		700 perusahaan	0	0	0	0	700 perusahaan	0,71

	Kegiatan Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Formal dan non Formal		700 perusahaan	0	0	0	0	700 perusahaan	0,57
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>									
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		10 kali	10 kali				10 kali	10 kali	

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target. Kedua kategori capaian tersebut terdapat di setiap program dan kegiatan pokok dan penunjang.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Hal ini telah disesuaikan dengan perubahan anggaran.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran : Terlaksananya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam. Dari target yang ingin dicapai sebesar 100% terrealisasi sebesar 100 %

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/ kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Keluaran : Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah. Dari target yang ingin dicapai sebesar 100 % terrealisasi sebesar 100 %.

Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Perkantoran Pemerintah guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah.

- Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

Keluaran : Tersedianya pendidikan dan pelatihan ketrampilan ketrampilan bagi pencari kerja. Dari target yang ingin dicapai 408 orang terealisasi 408 orang (100%)

Meskipun tingkat capaian realisasi memenuhi target Renja Tahun 2020, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2020 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 1700 orang. Capaian kinerja tahun 2020 baru memenuhi 24% dari target Renstra.

Kegiatan : Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja

Keluaran : Tersedianya pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja. Dari target yang ingin dicapai 488 orang terealisasi 488 orang (100%)

Meskipun tingkat capaian realisasi memenuhi target Renja Tahun 2020, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2020 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 1550 orang. Capaian kinerja tahun 2020 baru memenuhi 31.48% dari target Renstra.

Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur

Keluaran : Terlaksananya pengembangan kelembagaan yang berkualitas. Dari target yang ingin dicapai 35 LPK, 18 Asesor dan 20 Instruktur, terealisasi 100%

Meskipun tingkat capaian realisasi memenuhi target Renja Tahun 2020, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2020 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 100 LPK. Capaian kinerja tahun 2020 baru memenuhi 73 % dari target Renstra.

Kegiatan : Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit Kota Batam

Keluaran : Terlaksananya rapat LKS Tripartit. . Dari target yang ingin dicapai 5 kali, , terealisasi 100%.

Meskipun tingkat capaian realisasi memenuhi target Renja Tahun 2020, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2020 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 200 orang. Capaian kinerja Bimtek LKS Tripartit tidak memenuhi target Renstra hal ini disebabkan tidak ada pelaksanaan Bimtek pada tahun 2020 melainkan hanya rapat operasional kegiatan LKS Tripartit.

Kegiatan : Penyusunan dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

Keluaran : Terlaksananya rapat penyusunan dan perumusan UMK/UMSK dan kunjungan kerja Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit. Dari target yang ingin dicapai 5 kali, , terealisasi 100%. Meskipun tingkat capaian realisasi memenuhi target Renja Tahun 2020, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2020 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 12 kali.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 telah memenuhi target kinerja Renja 2020 dan Renstra, meskipun ada kegiatan yang tidak memenuhi target. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam melalui TAPD dalam memberikan pagu anggaran yang cukup kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat

- memenuhi target kinerja Renja maupun Renstra
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.  
Pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Perlu komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan daerah agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan menggenjot pendapatan daerah, sehingga anggaran yang tersedia bisa mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati di dalam dokumen perencanaan.
  5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target. Perlu melakukan upaya-upaya seperti untuk anggaran kedepan perlu dipacu target yang tidak tercapai, sehingga di akhir renstra target bisa tercapai. Mengupayakan jempot bola penggunaan pendanaan dari APBN, sehingga tidak membebani APBD Kota Batam.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan, dalam Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merencanakan 4 (empat program) yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2020, Tabel 3

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi kompetensi			1.700 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	939 orang	1.094 orang	302 orang	700 orang	700 orang	700 orang	
2	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya			1.550 orang	2.200 orang	2.200 orang	2.200 orang	1.300 orang	1.224 orang	468 orang	900 orang	900 orang	900 orang	
3	Jumlah pencari kerja yang diserap/ dan ditempatkan			15.500 orang	17.000 orang	17.000 orang	17.000 orang	25.108 orang	32.788 orang	28077 orang	20.000 orang	22.000 orang	25.000 orang	
4	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat			140 orang	160 orang	160 orang	160 orang	80 orang	80 orang	-	-	-	-	
5	Tingkat penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja per tahun			92%	94%	94%	94%	88%	87%	75%	95%	95%	95%	
6	Persentase jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek			80%	85%	85%	85%	76%	75%	73%	85%	85%	85%	

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Urusan ketenagakerjaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Tenaga Kerja, maka tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah memimpin, mengatur dan merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Keberhasilan pembangunan pada dibidang ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah satu focus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Misi II (Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera) dan Misi IV (Mewujudkan penguatan sektor industri dan mendorong peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian dalam menopang perekonomian daerah)

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Kendala dan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Skill pencari kerja yang lebih rendah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal, sehingga minimnya kesempatan kerja.
3. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain seperti tidak terpenuhinya sarat-syarat berdiri suatu perusahaan, kurang terbinanya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak kepada timbulnya perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
4. Upah sektoral, Undang-Undang/Peraturan yang tidak memberikan ukuran tertentu mengenai upah sektoral dan besaran upah sektoral melalui kesepakatan yang sepenuhnya dilakukan kepada pihak pekerja (serikat sector) dengan pengusaha (melalui organisasi pengusaha usaha sector)
5. Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur sering menimbulkan gejolak (demo pekerja) sehingga dapat mengganggu investasi.
6. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga mediator.
7. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja.
8. Banyak angkatan kerja dari luar Batam yang akhirnya menimbulkan tingginya angka pengangguran di Kota Batam.
9. Belum adanya pendampingan terhadap wirausaha baru
10. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan peningkatan kemampuan bagi tenaga kerja yang sudah bekerjasesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industry dalam negeri khususnya Kota Batam.
2. Memberikan informasi kerja melalui Bursa Kerja dan melakukan kerjasama dengan perusahaan.
3. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan ke Perusahaan.

4. Melakukan kajian tentang sektor unggulan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan membuat kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan.
5. Menetapkan struktur dan skala upah pekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni PP nomor 78 Tahun 2015
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat mediator dan bimbingan teknis lainnya diluar daerah.
7. Melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja.
8. Mengalihkan pembangunan industry ke daerah lain hingga kesempatan kerja tidak hanya bisa didapat di Kota Batam.
9. Menyediakan pendampingan bagi wirausaha baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan berfungsi sebagai penyedia/membuka lapangan pekerjaan.
10. Melakukan pembinaan terhadap Perusahaan maupun Pekerja/Buruh tentang arti pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

### **2.3.3 Peluang dan Tantangan**

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan menjadi isu utama di era automasi dan ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang dengan cepat. Baik peluang dan tantangan SDM dan ketenagakerjaan harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan Indonesia di era automasi dan ekonomi digital saat ini. Dengan melihat beberapa peluang sebagai berikut :

#### **a. Booming Ekonomi Digital dan Automasi**

Pemanfaatan teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif. Selanjutnya, dinamika ekonomi terkini juga direfleksikan dengan hadirnya era automasi. Era automasi yang diperkirakan akan melahirkan revolusi industri 4.0 ini berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari resources-based (berbasis sumber daya) menjadi knowledge-based economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Pergeseran terjadi seiring dengan kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan sementara itu disisi lain kekayaan intelektual jika dikelola dengan optimal akan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang tidak ada batasnya. Orang-orang di negara maju mencemaskan dampak teknologi terhadap pekerjaan.

Pekerjaan yang rutin memiliki kemungkinan tinggi untuk digantikan oleh mesin. Tetapi, teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif.

b. Angkatan Kerja Muda (Bonus Demografi)

Peluang pembangunan Ketenagakerjaan berikutnya adalah peningkatan penduduk usia kerja yang merupakan modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi kependudukan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan para calon pekerja dan anak-anak yang akan masuk pasar kerja agar mereka menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi, memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menghadapi persaingan global tenaga kerja baik di tingkat ASEAN (MEA) atau di dunia.

c. Perubahan Kebutuhan Keterampilan dan Model Pembelajaran.

Sebagai konsekuensi dari tren automasi dan tuntutan untuk berinovasi, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang mendalam. Di sisi lain, teknologi juga mendorong bertambahnya jenis dan jumlah pekerjaan yang sama kondisinya yaitu menuntut spesialisasi dan keahlian baru. Kebijakan ketenagakerjaan atau lebih luasnya kebijakan terkait dengan SDM harus dapat menjawab tantangan tersebut. Institusi pendidikan juga harus mulai mengubah arah orientasi kurikulum yang - 18- mampu mengimbangi dinamika tersebut. Peningkatan keahlian digital harus perlu diterapkan pada berbagai institusi pendidikan menengah. Pemerintah harus memikirkan mekanisme pembiayaan yang layak. Pekerja lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran orang dewasa (adult learning) ketika ada jaminan akan kelangsungan pendapatan dan penerimaan kembali di pasar tenaga kerja. Mengingat pentingnya training yang dilakukan di tempat kerja, perusahaan perlu berkontribusi terhadap pembiayaannya. Dalam kasus dimana perusahaan menjalankan sendiri program training-nya, mereka bisa bekerja bersama dengan organisasi pekerja untuk mendesain kerangka yang relevan. Organisasi pekerja / buruh memiliki peran utama dalam ekosistem ini.

d. Potensi Pariwisata

Di tengah kelesuan ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang, sebenarnya masih terbuka peluang bagi Indonesia khususnya di Kota Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia untuk dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya.

Optimisme ini salah satunya muncul dari perkembangan positif yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia.

Terlepas dari berbagai kendala yang masih mengimpit, sektor pariwisata menjadi sektor yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, serta menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Dukungan dan strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengembangkan sektor ini ke depan akan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Perkembangan sektor perjalanan dan pariwisata semakin menggembirakan sejalan pemulihan ekonomi global dari krisis. Pertumbuhan sektor ini pun diperkirakan akan mengikuti bahkan akan menyamai sektor-sektor utama perekonomian dunia seperti sektor jasa keuangan maupun transportasi dan manufaktur. Keberadaan sektor pariwisata secara langsung dapat menggerakkan bisnis akomodasi, transportasi, hiburan, dan pertunjukan. Pariwisata juga membantu perkembangan industri jasa penginapan, jasa makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa transportasi, industri budaya, olahraga, dan jasa rekreasi.

Adapun tantangan yang harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan di Kota Batam di era automasi dan ekonomi digital saat ini :

a. Kualitas Angkatan Kerja

Kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Dinas Tenaga Kerja dalam mengejar produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0. Transformasi ke arah automasi, ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 membutuhkan keseriusan dalam peningkatan kualitas SDM. Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya angkatan kerja sangat berhubungan dengan bagaimana negara berinvestasi pada sumber daya manusianya. SDM menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam masa depan perekonomian.

b. Tantangan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong industri manufaktur tampak mengalami perbaikan. Industri manufaktur sebagai sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang baik (decent job) harus diakselerasi. Terutama meningkatkan high-skilled labour. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang berdampak pada diperluasnya

kesempatan kerja, industri akselerasi kompetensi pekerja di sektor industri perlu dilakukan.

c. Tantangan Hubungan Industrial

Era digital dan automasi telah mengubah cara bisnis dan industri beroperasi, mengelola, serta mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. Minim nya jumlah mediator dalam menangani perselisihan menjadi tantangan kedepan untuk mengkader dan memberikan diklat kepada calon mediator .

d. Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk menjawab tantangan keterampilan dan keahlian SDM tersebut, salah satu solusinya adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja selain dengan memberikan pelatihan kerja juga menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya. Dengan begitu diharapkan setelah mendapat bekal keterampilan berproduksi atau keahlian tertentu tersebut masyarakat dapat berwirausaha atau mencari kerja.

#### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Tahun 2021-2024 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- e. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- g. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

- h. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel ndan rentan;
- j. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketenagakerjaan adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi isu strategis. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Menghadapi pasar kerja yang fleksibel ini salah satu hal yang dapat dilakukan adalah peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

- c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

## **2.4 Review terhadap awal RKPD**

Awal RKPD merupakan langkah awal atau pun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Tenaga Kerja Kota Batam perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berikut adalah tabel 3 review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 :

**Tabel 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kota Batam**

**Dinas Tenaga Kerja**

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Anal isis
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>11,334,055,931</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>11,837,210,795</b>	
	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	9,042,506,135	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8,742,175,557	
						2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	380,974,945	
	2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batam		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	100%	460,914,000	3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	238,636,100	
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	945,721,216	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	804,246,560	

	4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	345,982,560	5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	414,850,000	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>- Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi - Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi - Jumlah tenaga kerja yang terserap/ditempatkan - Pembangunan BLK</b>	<b>100%</b>	<b>13,763,397,780</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>- Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi - Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi</b>		<b>17,181,764,097</b>	
	5. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	6,230,174,500	6. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	8,347,622,397	
	6. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang terakreditasi	15%	890,450,000	7. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang terakreditasi	15%	432,150,000	
						8. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	100%	8,401,991,700	
	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>100%</b>	<b>2,050,000,000</b>						
	7. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi	100%	500,000,000						
	8. Kegiatan Pengelolaan Informasi		Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	100%	550,000,000						
	9. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyebarluasan informasi	100%	800,000,000	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>100%</b>	<b>475,845,310</b>	

			perlindungan CPMI dan PMI (kecamatan) - %							
	10.Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA	100%	200,000,000	9.Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi	100%	65,387,310
						10.Kegiatan Pengelolaan Informasi		Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	100%	221,908,000
						11.Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI (kecamatan) - %	100%	103,685,000
						12.Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA	100%	84,865,000
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha Pekerja Per Tahun</b>	<b>95 %</b>	<b>650,820,300</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha Pekerja Per Tahun</b>	<b>100%</b>	<b>141,211,100</b>
	11.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	200,000,000	13.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	64,403,000
						14.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	76,808,100
						<b>Program Perencanaan</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Rasio Penduduk yang Bekerja</b>	<b>100%</b>	<b>265,641,200</b>

					<b>Tenaga Kerja</b>				
					15.Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	20 dokumen	265,641,200	
<b>T O T A L</b>				<b>27,798,274,011</b>	<b>T O T A L</b>				<b>28,645,344,869</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepadapemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

**TABEL 4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI**  
**PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021**  
**KOTA BATAM**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelatihan Membuat Kue / TATA BOGA ( Volume = 30 Orang )	Bengkong Palapa II RW 06 / ( Se - Kecamatan Bengkong ) Kel. Tg. Buntung Kec. Bengkong., Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30 orang	Reses Dewan
2	Pelatihan Menjahit( Volume = 20 Orang )	Bengkong Palapa II RW 06 Kel. Tg. Buntung Kec. Bengkong. ( Se- Kecamatan Bengkong ), Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	Reses Dewan
3	Pelatihan K3 ( Volume = 20 Orang )	Se - Kecamatan bengkong, Kota Batam, Bengkong, Bengkong, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	Reses Dewan
4	Pelatihan Salon	Se - Kecamatan bengkong, Kota	Jumlah pencari	20 orang	Reses Dewan

	Kecantikan ( Volume = 20 Orang )	Batam, Bengkong, Bengkong, Seluruh Kelurahan/Desa	kerja yang dilatih		
5	Pelatihan Sertifikasi Keahlian (Perlatihan Instalasi Water Treatment Plant)	Perumahan Bukit Indah Tahap I RW 17, Kota Batam, Batu Aji, Kibing	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	Reses Dewan
6	Pelatihan Bahasa Korea ( Volume = 20 Orang )	Se Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Batu Aji, Batu Aji, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	9 orang	Reses Dewan
7	Pelatihan Bahasa Jepang ( Volume = 20 Orang )	Warga Se Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Batu Aji, Batu Aji, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	8 orang	Reses Dewan
8	Pelatihan Bahasa Inggris, ( Volume = 20 Orang )	Se - Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Batu Aji, Batu Aji, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	Reses Dewan
9	Pelatihan Untuk Pencaker Di Kecamatan Batam Kota	Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	15 orang	Reses Dewan
10	Pelatihan Memasak / Membuat Kue Tata Boga ( Volume = 20 Orang )	Ferensiana Garden RT 04 RW 52, Kel. Belian, / Se - kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Batam Kota, Batam Kota, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	9 orang	Reses Dewan
11	Pelatihan Welder, Kantor Lurah, Kel Sadai. Kecamatan Bengkong [Volume 20 Orang ]	Kantor lurah, Kel Sadai. Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Bengkong, Sadai	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	Reses Dewan
12	Pelatihan Welder, Kant	kantor camat, Kel sadai, Kecamatan	Jumlah pencari	20 orang	Reses Dewan

	or Camat, Kel Sadai, Keca matan Bengkong [20 Orang ]	Bengkong, Kota Batam, Bengkong, Sadai	kerja yang dilatih		
13	Pelatihan Kuliner ( Tata Boga Kue ) ( Volume = 10 Orang )	Perum. Pesona Bukit Laguna 2, Kel. Tg. Piayu Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10 orang	Reses Dewan
14	Pelatihan Menjahit ( Volume = 10 Orang )	Kavling Bukit Berbunga RT.04 dan RT. 05 RW.08, Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk atau Se - Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10 orang	Reses Dewan
15	Pelatihan Menjahit ( Volume = 10 Orang )	Perumahan GMP Blok D RT.01 RW. 01 ( Se- Kecamatan Sei Beduk ), Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10 orang	Reses Dewan
16	Pelatihan Salon ( Volume = 25 Orang )	Bukit Ayu Lestari RW. 11, Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25 orang	Reses Dewan
17	Pelatihan Serfikat Keahlian (Instalasi Pulse Blow & Formulasi Bia Char	Perumahan Bukit Indah Tahap I RW 17 Kibing, Kota Batam, Batu Aji, Kibing	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	Reses Dewan
18	Pelatihan Kerja K3	Pasir Indah RT 01- 03 RW 27, Kota Batam, Batu Aji, Kibing	Jumlah pencari kerja yang dilatih	24 orang	Reses Dewan
19	Pelatihan Kerja Menjahit	Perum. Purimas RT 05 RW 22, Kota Batam, Batu Aji, Buliang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	28 orang	Reses Dewan
20	Pelatihan Kerja K3	Danau Merah RT 03 RW 28, Kota Batam, Buliang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	12 orang	Reses Dewan
21				20 orang	

	Pelatihan Penanaman Hidroponik	Perumnas. Fanindo RT 01 RW 06, Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	Jumlah pencari kerja yang dilatih		Reses Dewan
22	Pelatihan Tata Boga Pengolahan Kue	Perum. Permata Puri 2 RT 03 RW 21, Kota Batam, Batu Aji, Buliang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	35 orang	Reses Dewan
23	Pelatihan Bagi Pencari Kerja Sertifikasi K3 Umum	Perumahan Bukit Indah II RW 18, Kota Batam, Batu Aji, Kibing	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10 orang	Reses Dewan
24	Pelatihan Pengembangan Masyarakat	Perum. Marina View RT 02 RW 10, Kota Batam, Batu Aji, Buliang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	23 orang	Reses Dewan
25	Pelatihan Welder	Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Batu Ampar, Batu Ampar, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	3 orang	Reses Dewan
26	Pelatihan Sertifikasi Bagi Pencari Kerja Seperti Bimtek & Sertifikasi HRD	Perumahan Bukit Indah II RW 18, Kota Batam, Batu Aji, Kibing	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10 orang	Reses Dewan
27	Pelatihan Sertifikasi Keahlian K3 Umum	RW 17 Bengkong Wahyu, RW 005 Bengkong Sarmen, Kota Batam, Tanjung Buntung	Jumlah pencari kerja yang dilatih	12 orang	Reses Dewan
28	Pelatihan Makeup/Ta tarias Di Kelurahan Patam Lestari	kelurahan Patam lestari, Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	Jumlah pencari kerja yang dilatih	15 orang	Reses Dewan
29	Pelatihan Welder	Legenda Malaka Blok G RT.03 RW 04, Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	Jumlah pencari kerja yang dilatih	15 orang	Reses Dewan

30	Pelatihan K3	Legenda Malaka Blok G RT.03 RW 04, Kota Batam, Batam Kota, Balai Permai	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17 orang	Reses Dewan
31	Pelatihan Tanaman Sayur Hydroponik ( Volume = 20 Orang )	Se - Kelurahan Tg. Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20 orang	Reses Dewan
32	Pelatihan Dan Keterampilan Sertifikasi Tour Guide	Kecamatan Batam kota, Kota Batam, Batam Kota, Batam Kota, Seluruh Kelurahan/Desa	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30 orang	Reses Dewan
33	Pelatihan Pra Kerja (Welder, Fitter, Scaffolding) Dengan Ukuran = 100 Orang	Masyarakat RW 7, RW 10 dan RW 11 Tanjung Teritip, RW 01 dan RW 02, Tanjung Uma, RW 01 Batu Selicin, RW 21, RW 23 dan RW 09 kel. Belian, Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	Jumlah pencari kerja yang dilatih	15 orang	Reses Dewan
34	Peningkatan Kompetensi Pelatihan Komputer Dari Karang Taruna Kelurahan Bengkong Indah (75 Orang)	Kantor Lurah Bengkong Indah, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	Jumlah pencari kerja yang dilatih	2 orang	Aspirasi
35	Pelatihan Juru Las Dan Sertifikasi, 60 Orang	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Las/Welder Kelurahan Sungai Langkai, Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	Jumlah pencari kerja yang dilatih	8 orang	Aspirasi
36	Pelatihan Las (80 Orang)	Air Raja RT.003/RW.001, Kota Batam, Galang, Air Raja, Kota Batam, Galang, Air Raja	Jumlah pencari kerja yang dilatih	11 orang	Aspirasi

BAB III  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Oleh karena itu, tema RPJM 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang dituangkan ke dalam 7 misi atau agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan Dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

### **3.2. Tema, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022**

Pada Ranwal RKPD visi pembangunan Kota Batam tahun 2022 adalah "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera". Adapun tema yang diambil adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera"

Prioritas pembangunan dalam Ranwal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2022**

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland dan hinterland</b>	1.1 Melanjutkan Penguatan KUMKM dan IKM	1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		4. Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1.2 Melanjutkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
		5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		6. Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	1.3 Pengurangan tingkat keparahan kedalaman kemiskinan	1. Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		3. Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	1.4 Peningkatan kapasitas, kualitas dan diversifikasi produk hasil usaha perikanan, pertanian dan usaha lainnya	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
		Veteriner	
		7. Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
<b>2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan di mainland dan hinterland</b>	2.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta penanganan banjir	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		2. Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	2.2 Pembangunan dan peningkatan penyediaan sarana prasarana kota dan permukiman	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		2. Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
		3. Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
		5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
		6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
	2.3 Penyediaan sarana prasarana transportasi untuk menunjang pemerataan ekonomi masyarakat	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan
		2. Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	2.4 Pembangunan dan peningkatan penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
		3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
		4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
	2.5 Pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
		5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		7. Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan
<b>3. Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland</b>	3.1 Peningkatan kualitas pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2. Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	3.2 Peningkatan pelayanan kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		3. Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
	3.4 Peningkatan Pengarusutamaan Gender	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		2. Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		6. Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	3.5 Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3.6 Peningkatan Kualitas Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3. Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
		4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		5. Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>4. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah</b>	4.1 Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3. Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4.2 Meningkatkan dan memperkuat kinerja pelayanan perizinan melalui penguatan SDM dan Teknologi Informasi.	1. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.3 Memberikan insentif dan kemudahan berusaha sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.4 Menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal.	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Dinas Pemadam Kebakaran

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
		Penyelamatan NonKebakaran	
	4.5 Mendorong percepatan penyelesaian lahan	1. Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan
<b>5. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>	5.1 Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik.	1. Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		11. Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		12. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>FOKUS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
	5.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
	5.3 Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.	1. Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.4 Peningkatan disiplin, kualifikasi kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.5 Penguatan Inovasi Daerah	1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
		2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
		3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
		4. Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### **3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

**Tabel. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam	Menurunkan masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Penurunan persentase pengangguran	11	10	9	8	7	6
			Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	90	92	93	94	95	96

### 3.4 Program Dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Mebel;
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
    - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
    - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
  - 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
    - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
  - 3) Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
    - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
  - 4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi
    - Job Fair/ Bursa Kerja
    - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  - 3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
    - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
  - 4) Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Hubungan Industrial
- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 2) Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
  - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022 adalah berikut:

**Tabel 7**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	7	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam</b>	Batam	100%	<b>10,580,883,162</b>	100%	<b>11.837.210.795,00</b>
			1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	<b>8,742,175,557</b>	100%	9,042,506,135
			3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	<b>380,974,945</b>	100%	568,456,900.00
			4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	<b>238,636,100</b>	100%	595,825,010.00
			5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	<b>804,246,560</b>	100%	893,322,760.00
						100%	<b>414,850,000</b>	100%	1,395,996,052.00

			6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi					
			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	- Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi - Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi			<b>17,181,764,097</b>		<b>21,708,531,995.70</b>
			7. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		100%	<b>8,347,622,397</b>	100%	9,856,232,195.70
			8. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi		15%	<b>432,150,000</b>	100%	1,657,852,900.00
			10. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi		100%	8,401,991,700	100%	9,916,490,100.00
			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>- Jumlah tenaga kerja yang terserap/ditempatkan</b>			<b>475,845,310</b>		<b>711,025,700.00</b>
			11. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi		100%	<b>65,387,310</b>	100%	66,652,850.00
			12. Kegiatan Pengelolaan Informasi	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja		100%	<b>221,908,000</b>	100%	351,079,850.00
			13. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyebaran informasi perlindungan CPMI dan PMI (kecamatan) - %		100%	<b>103,685,000</b>	100%	203,241,500.00
			14. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA		100%	<b>84,865,000</b>	100%	90,051,500.00
			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha - Pekerja Per Tahun</b>			<b>141,211,100</b>		<b>711,655,010.00</b>
			15. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	<b>64,403,000</b>	100%	471,201,500.00

				hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
				16.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan HI yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		100%	<b>76,808,100</b>	100%	240,453,510.00
				<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Rasio Penduduk yang Bekerja</b>			<b>265,641,200</b>		<b>246,166,800.00</b>
				17.Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun		20 buku	265,641,200	100%	246,166,800.00
								<b>28,645,344,869</b>		<b>36,897,251,976.20</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**  
**Tahun 2022**

No		Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
<b>I</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10,580,883,162.00</b>
	<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,742,175,557.00</b>
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,703,165,557.00
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39,010,000.00
	<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>380,974,945.00</b>
		3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,627,000.00
		4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115,546,695.00
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104,091,250.00
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000.00
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152,110,000.00
	<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>238,636,100.00</b>
		8 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	238,636,100.00
	<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>804,246,560.00</b>

		9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254,961,600.00
	<b>5</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>414,850,000.00</b>
		10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178,510,000.00
		11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,340,000.00
		12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00
<b>II</b>			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>17,181,764,097.00</b>
	<b>6</b>		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>8,347,622,397.00</b>
		13	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	8,347,622,397.00
	<b>7</b>		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>432,150,000.00</b>
		14	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	432,150,000.00
	<b>8</b>		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,401,991,700.00</b>
		15	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	8,401,991,700.00
<b>III</b>			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>475,845,310.00</b>
	<b>9</b>		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65,387,310.00</b>
		16	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	65,387,310.00
	<b>10</b>		<b>Pengelolaan Informasi</b>	<b>221,908,000.00</b>
		17	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	221,908,000.00
	<b>11</b>		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>103,685,000.00</b>

	18	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	103,685,000.00
	19	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	103,685,000.00
<b>12</b>		<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84,865,000.00</b>
	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84,865,000.00
<b>IV</b>		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>141,211,100.00</b>
<b>13</b>		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>64,403,000.00</b>
	21	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	64,403,000.00
<b>14</b>		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76,808,100.00</b>
	22	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	76,808,100.00
<b>V</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>265,641,200.00</b>
<b>15</b>		<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>265,641,200.00</b>
	23	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	265,641,200.00
		<b>Total</b>	<b>28,645,344,869.00</b>

## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2022 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2022 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2022.

Batam, 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA BATAM**



**RUDI SAKYAKIRTI, SH.MH**  
**NIP.19650606 199303 1 018**